



Sejarah Singkat Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ini semua muncul akibat peristiwa bersejarah yang puncaknya terjadi pada tahun 1948 , dimana Jogjakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia diduduki oleh tentara belanda dan berhasil direbut kembali oleh para pejuang dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan rakyat secara bahu membahu mempertahankan kedaulatan bangsa melalui semangat gotong royong , kebersamaan yang didasari atas rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. (sekelumit sejarah perjuangan rakyat indonesia mempertahankan kemerdekaan RI) . untuk itulah dalam rangka menangani masalah – masalah sosial tersebut Pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga yang disebut Departemen Sosial .

www.dinsos.bulelengkab.go.id

Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng diawali dengan terbentuknya jawatan sosial oleh pemerintah Republik Indonesia pusat di Jakarta. di kala itu jawatan sosial (merupakan istilah Departemen Sosial) yang ada di ibu kota provinsi yakni Provinsi Sunda Kecil yang berpusat di kota Singaraja Kabupaten Buleleng dibentuk untuk membantu masyarakat miskin yang diakibatkan oleh korban perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Banyak pejuang berkorban bahkan kehilangan sanak saudara mereka akibatnya banyak pula anak-anak terlantar, keluarga terlantar dan fakir miskin serta masalah sosial lainnya di Provinsi Sunda Kecil yang meliputi :Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur .

www.dinsos.bulelengkab.go.id

Selanjutnya setelah terjadinya pemisahan Provinsi Sunda Kecil menjadi (3) tiga provinsi yakni : Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta adanya pemindahan ibu kota provinsi dari Singaraja ke Denpasar , keberadaan jawatan sosial masih tetap ada namun setelah indonesia benar-benar merdeka terjadi penertiban administratur negara oleh pemerintah RI pusat nama jawatan sosial diganti menjadi departemen sosial (dan sekarang menjadi Kementerian Sosial RI).

Keberadaan Dinas Sosial Di Kabupaten Buleleng yang sampai tahun 1989 masih bernama kantor Departemen Sosial dan sejak kepemimpinan Presiden K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) sempat ditiadakan /dibubarkan dan kembali menjadi

www.dinsos.bulelengkab.go.id

departemen sosial setelah Presiden Megawati Soekarno Putri . berdasarkan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 bersamaan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka di kabupaten buleleng dibentuk lembaga yang menangani masalah-masalah sosial yaitu Kantor Kesejahteraan Sosial yang diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Dan Kantor Kabupaten Buleleng.

Inipun diperkuat dengan penyerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus pegawai pusat (pegawai departemen sosial) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berdasarkan usul Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Ri Nomor : 130/KBK/III/2000 Tanggal 30 Maret 2000.

selanjutnya keberadaan Kantor Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan jabatan eselon III dan dibantu oleh seorang kepala sub bagian tata usaha dan 4 (empat) orang kepala seksi dengan tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Buleleng menaikkan kembali status Kantor Kesejahteraan Sosial menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial yang diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor : 19 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng. adapun tugas pokok Dinas Kesejahteraan Sosial yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesejahteraan sosial , yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan jabatan eselon II dan dibantu oleh seorang kepala bagian tata usaha dan 4 (empat) orang kepala bidang dengan jabatan eselon III dan 10 (sepuluh) orang kepala sub bagian dan kepala seksi dengan jabatan eselon IV.

www.dinsos.bulelengkab.go.id

Mulai tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah diadakan perubahan nama lembaga dari Dinas Kesejahteraan Sosial menjadi Dinas Sosial , dengan tugas pokoknya melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial , dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan jabatan eselon II dan dibantu oleh seorang sekretaris dengan jabatan eselon IIIa dan 4 (empat) orang kepala bidang dengan jabatan eselon IIIb serta dibantu oleh 15 (lima belas) orang kepala sub bagian dan kepala seksi dengan jabatan eselon IVa, disamping itu dalam Struktur Dinas Sosial dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) “ Monumen Tri Yudha Sakti “ yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 21 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas di lingkungan pemerintah kabupaten buleleng.

UPTD Monumen Tri Yudha Sakti berlokasi di lingkungan Sangket Kelurahan Sukasada dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dengan jabatan eselon IVa dan seorang kepala sub bagian tata usaha dengan jabatan eselon IVb.

Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah khususnya di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terdapat pembaharuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur yaitu :

- 1) Peraturan Bupati Buleleng No. 3 Tahun 2023 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja.